

Golput dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020

Muhammad Farhan HR 

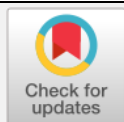
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: farhanhr35@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Farhan HR, M. (2023). Abstention in the 2020 Jambi Provincial Gubernatorial Election. *Society*, 11(2), 275-287.

DOI: [10.33019/society.v11i2.454](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.454)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 29 November, 2022;
Diterima: 24 November, 2023;
Dipublikasi: 6 Desember, 2023;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab fenomena golput dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodologi. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lainnya. Penggunaan fitur Concept Map pada NVIVO12 Plus juga menjadi bagian dari metodologi penelitian ini. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Provinsi Jambi dalam pemilihan gubernur tahun 2020 mencapai 1.658.525 jiwa yang menggunakan hak pilih. Dari jumlah tersebut, 1.570.285 jiwa suara dianggap sah, sedangkan 88.240 jiwa suara dianggap tidak sah. Pemilih yang tidak berpartisipasi (golput) mencapai 820.779 jiwa dari total 2.480.612 pemilih tetap. Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan jumlah golput tertinggi, di mana dari total 198.729 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 88.637 jiwa (44,60%) memilih untuk golput. Fenomena golput dalam pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan suku bangsa kandidat, tingkat pendidikan, kualitas calon yang kurang memadai, praktek politik, sikap apatis masyarakat, minimnya informasi, kendala teknis, dan lokasi tempat pemungutan suara yang sulit dijangkau.

Kata Kunci: Golput; Partisipasi Masyarakat; Pemilihan Gubernur; Tempat Pemungutan Suara; Tingkat Partisipasi

1. Pendahuluan

Pemilihan gubernur di Provinsi Jambi pada tahun 2020 menjadi perhatian utama karena tingginya jumlah masyarakat yang tidak memberikan suaranya atau tidak memilih, dikenal dengan istilah golput. Golput merupakan singkatan dari golongan putih, yang merujuk kepada individu yang memilih untuk tidak mengikuti pemilihan umum. Istilah ini mengambil inspirasi dari nama partai yang dominan pada era Suharto, yaitu Golkar. Fenomena golput mulai dikenal secara luas pada pemilu 1971 sebagai bentuk protes terhadap penggunaan birokrasi dan militer oleh Golkar untuk memastikan kemenangan mereka (Duile, 2021).

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an, Indonesia mengadakan pemilihan demokratis pertamanya pada tahun 1999. Sejak itu, negara ini telah menjadi negara demokrasi yang stabil, berhasil menyelenggarakan sejumlah pemilihan umum yang dianggap bebas dan adil secara luas (Fossati & Martinez i Coma, 2020). Dalam konteks demokrasi, partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan menjadi krusial. Melalui partisipasi, warga dapat menyuarakan keluhan dan membuat tuntutan yang didengar oleh publik secara lebih luas, serta membuat pemerintah dan politisi lebih akuntabel dan responsif (Teorell & Torcal, 2007).

Pemilihan gubernur, atau yang dikenal sebagai Pilgub, merupakan pertarungan politik untuk merebut kekuasaan di tingkat Provinsi (Lefaan, 2021). Meskipun penting untuk jabatan politik, pengetahuan tentang perilaku pemilih dalam pemilihan gubernur masih terbatas (do Amaral & Tanaka, 2016). Persepsi terhadap keadilan juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan, yang erat kaitannya dengan integritas dan etika pemerintahan. Etika melibatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kontrak sosial antara individu, institusi, dan masyarakat (Susila et al., 2015).

Studi empiris tentang partisipasi politik telah berlangsung sekitar 30 tahun. Awalnya, fokus penelitian lebih pada menjelaskan mengapa beberapa orang memilih untuk memberikan suara sementara yang lain tidak (Milbrath, 1981). Dalam sebuah artikel (Lowndes et al., 2006), disimpulkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh 'aturan yang digunakan' secara lokal, tidak bergantung pada status sosial ekonomi atau tingkat modal sosial di suatu daerah. Meskipun pemungutan suara adalah bentuk keterlibatan politik yang paling umum, sikap golput mencerminkan tingkat keterlibatan politik yang rendah. Karena tingkat keterlibatan politik dapat menjadi sinyal penting dan prediktor arah demokrasi serta ekspresi kedaulatan rakyat, penting untuk mengkaji jumlah keterlibatan politik rakyat dalam pemilihan (Wardhani, 2018).

Dalam demokrasi seperti Indonesia, perbedaan politik di antara individu dianggap wajar. Beragamnya peringkat sosial, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, budaya daerah, dan jenis kelamin menciptakan variasi dalam preferensi politik. Perbedaan gender, khususnya, merupakan pembedaan yang paling halus di antara faktor-faktor tersebut (Nurgiansah, 2021). Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak pilih dan tanggung jawab kewarganegaraan. Ketersediaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Nasution & Kushandajani, 2019).

Penelitian mengenai fenomena tidak memilih (golput) pada Pilgub di Provinsi Jambi tahun 2020 masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis penyebab fenomena golput yang terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2020. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur di Provinsi Jambi pada 9 Desember 2020 hanya mencapai 67.88%, tidak mencapai target yang telah

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan sebesar 77,50%.

2. Kajian Pustaka

2.1. Perilaku Politik

Perilaku politik, dalam konteks pengambilan keputusan etis, dapat memiliki dampak baik dan buruk (Amah, 2022). Terlibat atau berperan dalam kegiatan politik merupakan salah satu aspek dari perilaku atau keterlibatan politik (Almond & Powell, 1966). Namun, aktivitas politik selalu diprakarsai oleh ekspresi kepentingan di mana seseorang memiliki kekuatan politik. Sebaliknya, perilaku politik adalah perilaku individu yang bertindak dalam kapasitas pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Huntington & Nelson, 1994).

Beberapa penelitian (Agerberg, 2019b; Almond & Verba, 1963; Carpini & Keeter, 1996; Hillygus, 2005; Jennings, 1996; Nie et al., 1996; Verba & Nie, 1987; Wolfinger & Rosenstone, 1980) menunjukkan bahwa warga negara berpendidikan tinggi cenderung lebih canggih secara politik, artinya lebih berpengetahuan dan kompeten secara politik, dan juga lebih aktif dalam partisipasi politik. Hubungan antara pendidikan dan partisipasi politik mungkin merupakan hubungan yang paling mapan dalam penelitian tentang perilaku politik. Sekolah memiliki peran penting dalam sosialisasi politik, yang berkontribusi pada keterlibatan politik pemuda yang lebih baik (Pontes et al., 2017). Penggunaan internet dan aktivitas elektronik lainnya juga berdampak pada peningkatan pengetahuan pengguna online tentang politik serta memacu keterlibatan dan partisipasi politik (Ahmad et al., 2019).

Perilaku politik melibatkan pengambilan keputusan strategis, yang sering kali dapat merugikan kualitas keputusan dan melemahkan kinerja organisasi (Shepherd et al., 2020). Kemanjuran politik dan kepercayaan politik menjadi fokus sentral studi perilaku politik (Craig, 1979). Teori perilaku politik yang berasal dari metodologi khas pilihan publik mempertimbangkan peran aktor dalam proses politik, termasuk pemilih, partai, kelompok kepentingan, birokrat, dan politisi (Self, 1993). Ketidaksetaraan dalam keterlibatan politik dapat melemahkan kualitas musyawarah, perwakilan, dan legitimasi dalam proses demokrasi (Kittilson, 2016). Perbedaan gender dan ras juga berpengaruh dalam partisipasi politik dan kontribusi suara kepada calon kandidat (Zhang & Heerwig, 2022).

Dalam penelitian (Liu, 2020), disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan Asia memberikan suara dengan jumlah yang sama dalam pemilu, tetapi terdapat kesenjangan gender dalam jenis tindakan politik lainnya. Beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pemilih melibatkan aspek sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015). Studi tentang perilaku politik menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik dibandingkan individu dengan pendidikan rendah (Persson, 2015). Bukti juga menunjukkan bahwa perubahan dalam teknologi komunikasi dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku dalam pemilu (Tolbert & McNeal, 2003).

2.2. Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu

Reformasi pemilu telah memberikan kesempatan kepada warga negara di banyak negara bagian untuk memilih di antara metode pemungutan suara yang lebih nyaman (Herrnson et al., 2019). Dalam pemilihan demokratis, para pemilih dipanggil ke tempat pemungutan suara untuk menyatakan preferensi mereka dalam mendukung sejumlah partai dan kandidat tertentu. Meskipun demikian, ada proporsi pemilih yang konsisten menganggap pilihan

mereka sebagai bentuk suara penolakan (Garzia & Ferreira da Silva, 2021). Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif rakyat (Haruni, 2022). Kualitas pemerintahan yang buruk dapat berpengaruh signifikan pada hubungan individu dengan negara dan keyakinan mereka terhadap kemungkinan mencapai tujuan melalui proses demokrasi (Agerberg, 2019a). Oleh karena itu, dalam pemilihan, pemilih mungkin menyuarakan hak pilihnya sebagai bentuk penolakan atau ketidakpartisipasi.

Dalam penelitian (Ivanchenko et al., 2019), disimpulkan bahwa responden yang seimbang secara emosional lebih cenderung untuk mencalonkan diri dan jarang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Penyebab ketidakpartisipasi masyarakat dalam pemilihan juga dapat berasal dari persepsi bahwa masalah utama tidak ditangani, sehingga pemilih mungkin enggan menyuarakan hak pilihnya dalam pemilihan mendatang (Peterson & Wrighton, 1998). Dalam penelitian (Lin & Lunz Trujillo, 2023), disimpulkan bahwa aktivitas penduduk non-pedesaan lebih banyak berpartisipasi dan lebih jarang melakukan protes, sedangkan di daerah pedesaan lebih aktif dalam partisipasi dan sering melakukan protes, yang dapat menghambat peluang partisipasi bagi penduduk pedesaan.

Identitas nasional kewarganegaraan yang kuat memiliki dampak positif pada kepercayaan politik, sementara identitas nasional etnis yang kuat memiliki dampak negatif pada kepercayaan politik (Berg & Hjerm, 2010). Persepsi ketidaksetaraan sosial juga berperan penting dalam menentukan jumlah pemilih serta memahami hubungan antara partisipasi dalam pemilu (Silagadze et al., 2023). Literatur gerakan sosial menunjukkan bahwa kepercayaan politik akan memiliki konsekuensi perilaku partisipatif yang signifikan hanya jika terkait dengan tingkat kemanjuran politik yang tinggi (Hooghe & Marien, 2013). Ada dua faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu faktor individu dan faktor sosial politik (Parchami, 2007).

Pemilu selama pandemi menjadi sumber perdebatan karena dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilihan kepala daerah, sangat perlu diperhatikan (Marsallindo & Safitri, 2021). Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu apatis (menarik diri dari proses politik), *spectator* (ikut serta dan aktif selama pemilihan umum), *gladiator* (aktif dalam proses politik sebagai komunikator dan pelaku kampanye), dan pengkritik (berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional) (Suharyanto, 2014).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian di mana peneliti mengumpulkan sejumlah buku, majalah, dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009). Data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, hasil penelitian tesis, disertasi, serta sumber-sumber lain seperti situs internet dan koran yang relevan dengan tema penelitian (Hidayah et al., 2019; Nazir, 2005).

Teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menghubungkan fenomena golput yang terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk dapat menarik kesimpulan yang konkret mengenai permasalahan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020.

Dalam penelitian ini, digunakan juga fitur Concept Map pada NVIVO12 Plus untuk memetakan penyebab tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya

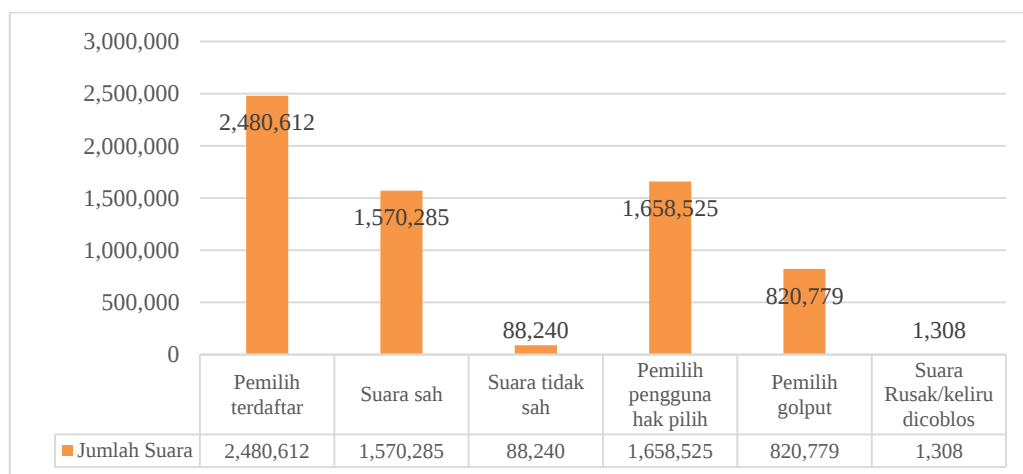
(golput) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 (Farhan HR & Nurmandi, 2022). NVIVO 12 Plus merupakan program analisis data kualitatif yang memudahkan proses pengumpulan, pengkategorian, pemetaan, analisis, dan visualisasi data kualitatif. Program ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis data, seperti makalah (memo, laporan, undang-undang, dan dokumen fotografi) dan hasil wawancara (Farhan HR & Purnomo, 2023).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jambi tahun 2020

Pada tahun 2020, Provinsi Jambi menyelenggarakan pemilihan gubernur untuk masa jabatan 2021 hingga 2024. Berbeda dari pemilihan gubernur sebelumnya, tahun ini terdapat tiga pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi 2020. Pasangan nomor urut 1 terdiri dari Cek Hendra dari Partai Golkar dan Ratu Munawaroh dari Partai PDI-P. Pasangan ini didukung oleh dua partai lain, yaitu Nasdem dan PBB. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 terdiri dari Fachrori Umar dari Partai Gerindra dan Syafril Nursal dari Partai Demokrat. Pasangan ini diusung oleh empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, Hanura, dan PPP, serta didukung oleh satu partai lainnya, yaitu Gelora. Pasangan nomor urut 3 terdiri dari Al Haris dari Partai PAN dan Abdullah Sani dari Partai PKB. Pasangan ini diusung oleh tiga partai, yaitu PKB, PAN, dan PKS, dan didukung oleh dua partai lainnya, yaitu PKPI dan Berkarya.

Perlu dicatat bahwa pemilihan gubernur pada tahun 2020 diadakan dua kali, yaitu pada 9 Desember 2020 dan 27 Mei 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya gugatan dari pasangan nomor urut 1, yang mengajukan gugatan terhadap hasil suara ke Mahkamah Konstitusi RI pada 23 Desember 2020 karena kalah dari pasangan nomor urut 3. Selain itu, pemilihan gubernur di tahun 2020 ini juga dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19.



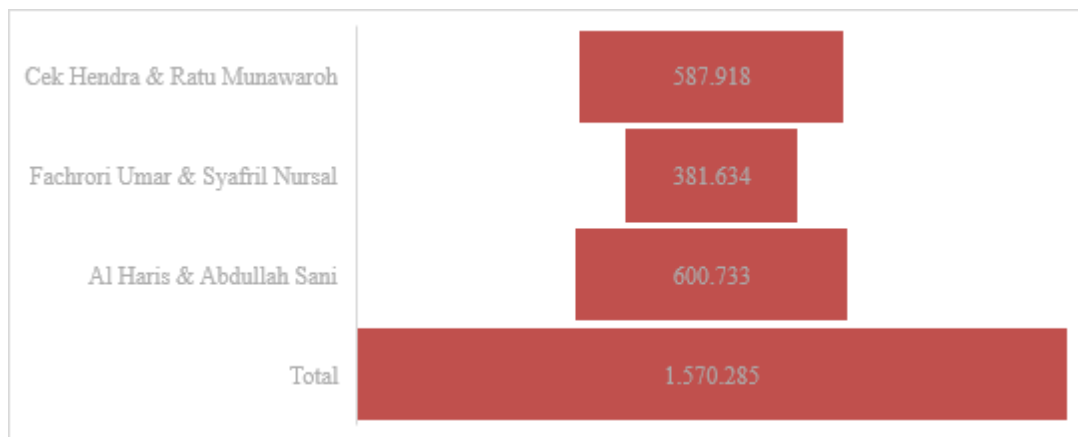
Gambar 1. Jumlah Suara pada Pemilihan Gubernur Jambi 2020

Sumber: (KPU, 2020)

Grafik tersebut menunjukkan hasil pemilihan gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2020 untuk masa jabatan 2021-2024. Jumlah pemilih terdaftar mencapai 2.480.612 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 1.658.525 jiwa yang menggunakan hak pilih, dengan 1.570.285 jiwa suara sah, dan terdapat 88.240 jiwa suara tidak sah. Selain itu, dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi tersebut, masih terdapat masyarakat yang memilih golput, artinya tidak menggunakan hak pilihnya, sebanyak 820.779 jiwa. Sebanyak 1.308 suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru saat dicoblos.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara tidak selalu memilih berdasarkan pertimbangan hati nurani, melainkan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain. Adanya jumlah suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru menunjukkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan pemilihan.

Lebih lanjut, angka golput yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya politik uang yang tersebar secara masif. Oleh karena itu, sebaiknya partisipasi pemilih tidak hanya meningkat karena praktik politik uang, melainkan lebih diupayakan agar masyarakat terlibat dalam pemilihan berdasarkan pemahaman dan kepercayaan terhadap calon tanpa adanya pengaruh eksternal yang merugikan proses demokrasi.



Gambar 2. Jumlah Suara berdasarkan Calon Kandidat Gubernur Jambi 2020

Sumber: (KPU, 2020)

Terdapat tiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, untuk masa kepemimpinan dari tahun 2021 hingga 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, yaitu Cek Hendra bersama Ratu Munawaroh, berhasil memperoleh dukungan sebanyak 587.918 suara dari masyarakat Provinsi Jambi. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Fachrori Umar bersama Syafril Nursal, mendapatkan suara sebanyak 381.632, dan pasangan nomor urut 3, Al Haris bersama Abdullah Sani, berhasil meraih suara terbanyak dengan jumlah 600.733 dari total suara sah sebanyak 1.570.285.

Dalam konteks ini, perolehan suara Al Haris bersama Abdullah Sani unggul 12.815 suara dari pasangan nomor urut 1, yaitu Cek Hendra bersama Ratu Munawaroh. Sementara perbedaan suara antara Al Haris & Abdullah Sani dengan pasangan nomor urut 2, yaitu Fachrori & Syafril Nursal, cukup besar, yakni sebanyak 219.099 suara. Dengan demikian, perolehan suara Al Haris bersama Abdullah Sani menjadi yang tertinggi, mengungguli dua pasangan calon gubernur lainnya. Oleh karena itu, Al Haris dan Abdullah Sani terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa kepemimpinan 2021-2024.

Namun, jumlah suara yang diperoleh oleh ketiga pasangan calon gubernur Provinsi Jambi masih jauh kalah dari jumlah suara masyarakat Provinsi Jambi yang memilih golput dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, yaitu sebanyak 820.779 suara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Jambi dalam pemilihan gubernur hanya mencapai 67,88%, yang masih di bawah target KPU Provinsi Jambi yang menargetkan partisipasi masyarakat sebanyak 77,50%.

Tabel 1. Total Partisipasi Masyarakat

Wilayah	Cek Endra	Fachrori Umar	Al Haris	Total
Kabupaten Batanghari	63.045	30.555	58.249	151.849
Kabupaten Bungo	52.339	78.927	31.313	162.579
Kabupaten Kerinci	29.717	50.330	26.909	106.956
Kabupaten Merangin	34.443	16.122	116.100	166.665
Kabupaten Muaro Jambi	62.748	27.746	65.008	155.502
Kabupaten Sarolangun	82.902	9.556	37.027	129.485
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	69.117	31.934	45.929	146.980
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53.401	24.862	45.660	123.923
Kabupaten Tebo	54.519	37.224	41.342	133.085
Kota Jambi	74.407	38.421	126.334	239.162
Kota Sungai Penuh	11.280	35.957	6.862	54.099
Total	587.918	381.634	600.733	1.570.285

Sumber: (KPU, 2020)

Tabel menunjukkan bahwa Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota. Dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, setiap Kabupaten/Kota memiliki jumlah hak suara yang berbeda. Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi, memiliki jumlah hak suara sah terbanyak, yakni 239.162, sementara Kota Sungai Penuh memiliki jumlah hak suara paling sedikit, yaitu 54.099, karena merupakan kota yang baru dibentuk pada tahun 2009 setelah pemekaran dari Kabupaten Kerinci.

Dari 3 pasangan calon gubernur Provinsi Jambi, mereka bersaing untuk memperoleh suara terbanyak di 11 Kabupaten/Kota. Pemilihan mereka difokuskan pada daerah dengan jumlah pemilih terbanyak. Namun, hasilnya mengejutkan. Pasangan calon gubernur Provinsi Jambi nomor urut 1, Cek Endra bersama Ratu Munawaroh, memenangkan pemilihan suara terbanyak di 5 Kabupaten: Batanghari, Sarolangun, Tebo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Barat. Sementara itu, pasangan calon gubernur Provinsi Jambi nomor urut 2 memenangkan 3 wilayah Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Pasangan calon gubernur Provinsi Jambi nomor urut 3, yang terpilih menjadi gubernur Provinsi Jambi untuk masa kepemimpinan tahun 2021-2024, hanya memenangkan 3 wilayah: Merangin, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

Dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan jumlah hak suara terbanyak memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilihan. Kota Jambi, sebagai wilayah dengan hak suara terbanyak, berpengaruh besar dalam penentuan kemenangan. Kabupaten Merangin dan Muaro Jambi, meskipun memiliki hak suara terbanyak nomor 4 di Provinsi Jambi, juga berperan penting dalam kemenangan gubernur Provinsi Jambi.

Tabel 2. Jumlah Golput di Provinsi Jambi Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Golput	Total Pemilih
Kabupaten Batanghari	33.702 (16,88%)	199.630
Kabupaten Bungo	70.463 (29,07%)	242.379
Kabupaten Kerinci	88.637 (44,60%)	198.729
Kabupaten Merangin	85.094 (33,18%)	256.453

Wilayah	Jumlah Golput	Total Pemilih
Kabupaten Muaro Jambi	121.785 (42,54%)	286.267
Kabupaten Sarolangun	70.747 (34,68%)	203.999
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	60.039 (27,64%)	217.141
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	35.472 (21,12%)	167.935
Kabupaten Tebo	99.065 (41,77%)	237.157
Kota Jambi	143.371 (35,74%)	401.049
Kota Sungai Penuh	12.404 (17,75%)	69.873
Total	820.779	2.480.612

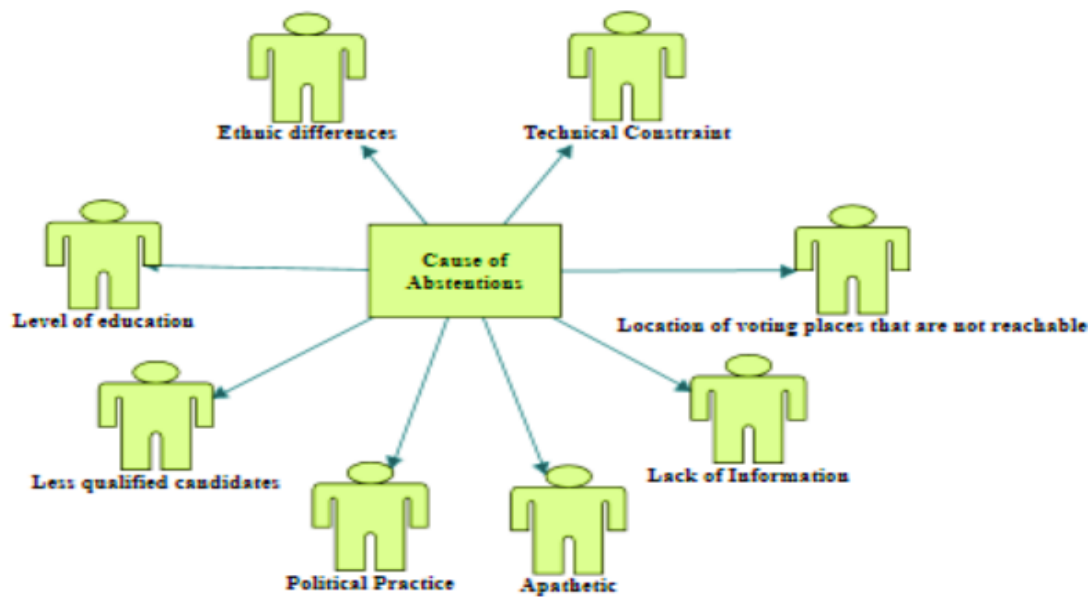
Sumber: (KPU, 2020)

Tabel menunjukkan bahwa sebanyak 820.779 jiwa tidak menggunakan hak pilih (golput) dari total 2.480.612 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Tingkat golput tertinggi tercatat di Kabupaten Kerinci, dimana dari total 198.729 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sebanyak 88.637 (44,60%) memilih golput. Muaro Jambi berada di posisi kedua dengan tingkat golput 42,54%, diikuti oleh Kabupaten Tebo dengan tingkat golput 41,77%. Kota Jambi, meskipun memiliki jumlah pemilih terbanyak, mencatatkan tingkat golput sebesar 35,74%, sedangkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo memiliki tingkat golput masing-masing sekitar 34,68%, 33,18%, dan 29,07%.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Sungai Penuh memiliki tingkat golput yang relatif lebih rendah, dengan masing-masing 27,64%, 21,12%, dan 17,75%. Sementara itu, tingkat golput paling rendah pada pilgub Jambi 2020 terjadi di Kabupaten Batanghari, dimana dari total 199.630 pemilih yang terdaftar di DPT, sebanyak 33.702 (16,88%) memilih golput.

4.2. Penyebab Golput

Tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) pada Pilgub 2020 di Provinsi Jambi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Berikut beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi Pilgub tahun 2020 di Provinsi Jambi.



Gambar 3. Penyebab masyarakat golput pada Pilgub Jambi 2020

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan NVIVO12 Plus (2023)

Gambar tersebut mengindikasikan beberapa faktor penyebab tingginya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam pemilihan gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2020, antara lain:

a) Perbedaan Suku Bangsa

Masyarakat Jambi memiliki keragaman etnis dengan sejumlah pendatang dan penduduk asli. Data Sensus Penduduk Indonesia dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari total penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.069.771 jiwa, sekitar 43,57% merupakan penduduk asli. Keturunan Jawa, yang mencakup sekitar 29,10% dari populasi, memainkan peran signifikan dalam politik Jambi, seperti yang terlihat pada pencalonan Al Haris sebagai Gubernur Jambi 2020 bersama Abdullah Sani yang merupakan keturunan Jawa.

b) Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki dampak besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur Jambi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan distribusi tingkat pendidikan di Provinsi Jambi, dimana sekitar 26,16% memiliki pendidikan setara SD, 23,41% setara SMP, 28,10% setara SMA, 1,78% D1-D3, 7,15% D4-S3, dan 13,40% tidak memiliki ijazah. Tingkat pendidikan yang berbeda dapat memengaruhi pola pikir masyarakat terkait partisipasi dalam pesta demokrasi.

c) Kandidat Berkualitas Rendah

Kualitas kandidat yang dirasakan rendah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai dan calon, mendorong masyarakat untuk tidak memberikan suara atau golput.

d) Praktik Politik

Praktik politik seperti politik uang dapat membingungkan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dampaknya adalah masyarakat memilih untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara.

e) Sikap Apatis

Sikap apatis, terutama di kalangan pemilih muda, menjadi faktor penting yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap proses pemilu dan akhirnya golput.

f) Kurangnya Informasi

Ketidakpahaman banyak masyarakat terkait jadwal pelaksanaan Pilgub 2020 juga dapat menjadi penyebab tingginya golput. Upaya penyuluhan dan informasi yang kurang efektif dapat menghambat partisipasi masyarakat.

g) Kendala Teknis

Kendala teknis seperti sakit, kegiatan lain, bepergian, atau masalah pribadi dapat menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pembatasan waktu yang diberikan oleh pekerjaan sehari-hari atau kondisi migrasi juga dapat berdampak pada partisipasi pemilih.

h) Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang Tidak Terjangkau

Lokasi geografis yang sulit dijangkau oleh tempat pemungutan suara juga dapat menjadi hambatan. Jarak yang jauh dari rumah ke tempat pemungutan suara dapat mengurangi partisipasi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan gubernur di Provinsi Jambi pada tahun 2020 menjadi fokus perhatian karena diadakan dua kali, yakni pada 9 Desember 2020 dan 27 Mei 2021. Ini disebabkan oleh adanya gugatan dari pasangan nomor urut 1, yang mengajukan gugatan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi RI pada 23 Desember 2020 karena kalah dari rivalnya, yakni nomor urut 3. Selain itu, pemilihan gubernur pada tahun 2020 dilaksanakan di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang tidak memberikan suara atau tidak memilih (golput). Tingkat partisipasi masyarakat pada pilgub Jambi di tahun 2020 hanya mencapai 67,88%, sementara KPU menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,50%. Artinya, target KPU tidak tercapai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perbedaan suku bangsa, tingkat pendidikan, kandidat yang kurang berkualitas, praktik politik, sikap apatis, minimnya informasi, kendala teknis, dan lokasi tempat pemungutan suara yang tidak terjangkau. Ke depannya, diharapkan adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan, khususnya pada pilgub di masa yang akan datang. Diperlukan upaya pengembangan inisiatif dan terobosan untuk menarik perhatian masyarakat, terutama melalui pemberian edukasi khususnya pada calon pemilih baru.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Agerberg, M. (2019a). *Quality of Government and Political Behavior: Resignation and Agency*.
- Agerberg, M. (2019b). The Curse of Knowledge? Education, Corruption, and Politics. *Political Behavior*, 41(2), 369–399. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7>
- Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan. *SAGE Open*, 9(3), 2158244019864484. <https://doi.org/10.1177/2158244019864484>
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: A developmental approach*. Little, Brown and Company.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Amah, O. E. (2022). The Role of Political Prudence and Political Skill in the Political Will and Political Behavior Relationship. *Journal of Business Ethics*, 176(2), 341–355. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04696-x>
- Berg, L., & Hjern, M. (2010). National Identity and Political Trust. *Perspectives on European Politics and Society*, 11(4), 390–407. <https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524403>
- Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1996). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.
- Craig, S. C. (1979). Efficacy, Trust, and Political Behavior: An Attempt to Resolve a Lingering Conceptual Dilemma. *American Politics Quarterly*, 7(2), 225–239. <https://doi.org/10.1177/1532673X7900700207>
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode penulisan karya ilmiah*. Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan.
- do Amaral, O. E., & Tanaka, M. (2016). How do Brazilians choose their governors? An attempt at understanding the electoral behavior in the gubernatorial elections in Brazil in 2014. *Opinio Publica*, 22(3), 675–701. <https://doi.org/10.1590/1807-01912016223675>
- Duile, T. (2021). Challenging Hegemony: Nurhadi-Aldo and the 2019 Election in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(4), 537–563. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1748896>
- Farhan HR, M., & Nurmandi, A. (2022). Government Data Processing Mechanism to Support Smart City: A Bibliometric Review. In C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (Eds.), *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1655 CCIS* (pp. 498–506). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19682-9_63
- Farhan HR, M., & Purnomo, E. P. (2023). Biofuel Successful Strategies towards Sustainable Development: A Bibliometrics Analysis. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 20(1), 31–43. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v20i1.31-43>
- Fossati, D., & Martinez i Coma, F. (2020). Exploring citizen turnout and invalid voting in Indonesia: two sides of the same coin? *Contemporary Politics*, 26(2), 125–146. <https://doi.org/10.1080/13569775.2019.1690210>
- Garzia, D., & Ferreira da Silva, F. (2021). Negativity and Political Behavior: A Theoretical Framework for the Analysis of Negative Voting in Contemporary Democracies. *Political Studies Review*, 20(2), 282–291. <https://doi.org/10.1177/14789299211000187>
- Haruni, C. Wi. (2022). Community Political Participation In The 2019 Presidential And Vice-Presidential Elections In Malang Regency. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.20586>
- Herrnson, P. S., Hanmer, M. J., & Koh, H. Y. (2019). Mobilization Around New Convenience

- Voting Methods: A Field Experiment to Encourage Voting by Mail with a Downloadable Ballot and Early Voting. *Political Behavior*, 41(4), 871–895. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9474-4>
- Hidayah, N., Sulfahmi, S., Zairani, I., Yusuf, M., & Sufiati. (2019). Combine Assurance Dalam Konteks Pengendalian. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi*, 8(2), 32–37. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/379>
- Hillygus, D. S. (2005). The missing link: Exploring the relationship between higher education and political engagement. *Political Behavior*, 27(1), 25–47. <https://doi.org/10.1007/s11109-005-3075-8>
- Hooghe, M., & Marien, S. (2013). a Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe. *European Societies*, 15(1), 131–152. <https://doi.org/10.1080/14616696.2012.692807>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Ivanchenko, A., Ignatieva, I., Lefterov, V., & Timchenko, O. (2019). Personality traits as determinants of political behavior: Ukrainian electoral and voting tendencies. *Studia Politica*, 19(3–4), 441–465.
- Jennings, M. K. (1996). Political knowledge over time and across generations. *Public Opinion Quarterly*, 60(2), 228–252. <https://doi.org/10.1086/297749>
- Kittilson, M. C. (2016). Gender and Political Behavior. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.71>
- KPU. (2020). Hitung Suara Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. In *Komisi Pemilihan Umum*. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/3372>
- Lefaan, A. (2021). Identity Politics And The Future Of Democracy In Papua. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–6. <https://www.abacademies.org/articles/identity-politics-and-the-future-of-democracy-in-papua-12488.html>
- Lin, J., & Lunz Trujillo, K. (2023). Urban-Rural Differences in Non-Voting Political Behaviors. *Political Research Quarterly*, 76(2), 851–868. <https://doi.org/10.1177/10659129221119195>
- Liu, S.-J. S. (2020). Gender gaps in political participation in Asia. *International Political Science Review*, 43(2), 209–225. <https://doi.org/10.1177/0192512120935517>
- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Local political participation: The impact of rules-in-use. *Public Administration*, 84(3), 539–561. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00601.x>
- Marsallindo, A., & Safitri, C. (2021). Public Legitimacy of Government and People's Political Participation: The Case of the 2020 West Sumatra Regional Election, Indonesia. *Journal of Asian Social Science Research*, 3(1), 93–102. <https://doi.org/10.15575/jassr.v3i1.45>
- Milbrath, L. W. (1981). Political participation. In *The handbook of political behavior* (pp. 197–240). Springer.
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 227. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nie, N. H., Junn, J., & Stehlik-Barry, K. (1996). *Education and democratic citizenship in America*. University of Chicago Press.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9.

- <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/14994>
- Parchami, D. (2007). Public Participation in the Ninth Presidential Election of Iran. *Human Sciences*, 53, 335.
- Persson, M. (2015). Education and political participation. *British Journal of Political Science*, 45(3), 689–703. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000409>
- Peterson, G., & Wrighton, J. M. (1998). Expressions of Distrust: Third-Party Voting and Cynicism in Government. *Political Behavior*, 20(1), 17–34. <https://doi.org/10.1023/A:1024891016072>
- Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2017). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Self, P. (1993). Theories of Political Behaviour. In P. Self (Ed.), *Government by the Market?* (pp. 21–47). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-23111-9_2
- Shepherd, N. G., Hodgkinson, G. P., Mooi, E. A., Elbanna, S., & Rudd, J. M. (2020). Political behavior does not (always) undermine strategic decision making: Theory and evidence. *Long Range Planning*, 53(5), 101943. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101943>
- Silagadze, N., Christensen, H. S., Sirén, R., & Grönlund, K. (2023). Perceptions of Inequality and Political Participation: The Moderating Role of Ideology. *Political Studies Review*, 21(2), 285–305. <https://doi.org/10.1177/14789299221082037>
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 151–160.
- Susila, I., Dean, D., & Harness, D. (2015). Intergenerational spaces: Citizens, political marketing and conceptualising trust in a transitional democracy. *Journal of Marketing Management*, 31(9), 970–995. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2015.1036768>
- Teorell, J., & Torcal, M. (2007). Political participation: Mapping the terrain. In *Citizenship and involvement in European democracies* (pp. 358–381). Routledge.
- Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2003). Unraveling the effects of the Internet on political participation? *Political Research Quarterly*, 56(2), 175–185.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1987). *Participation in America: Political democracy and social equality*. University of Chicago Press.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Wolfinger, R. E., & Rosenstone, S. J. (1980). *Who votes?* Yale University Press.
- Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117–135. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.533>
- Zhang, Y., & Heerwig, J. (2022). Gender, Race, and Intersectionality in Campaign Cash to the U.S. Congress, 1990 to 2014. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 8. <https://doi.org/10.1177/23780231221121063>

Tentang Penulis

Muhammad Farhan HR, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, pada tahun 2021. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia..

E-Mail: farhanhr35@gmail.com